

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian variabel X1 menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kota Blitar. Keseluruhan OPD di Kota Blitar sudah menerapkan sistem pengendalian yang baik. Hal ini ditandai dengan hasil kuesioner yang telah disebar. Sebagian besar responden atau para pegawai OPD di Kota Blitar menjawab “setuju” dan “sangat setuju”, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai OPD di Kota Blitar sudah memahami dan menerapkan sistem pengendalian internal secara optimal pada masing-masing OPD di Kota Blitar.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal dibentuk dengan tujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien transparan, dan akuntabel, Mengamati, memeriksa ketelitian dan kebenaran pada data akuntansi, memberikan keyakinan yang memadai guna tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengamanan kekayaan negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Dengan tercapainya tujuan sistem pengendalian internal, maka pertanggungjawaban atas penyelenggaraan keuangan pemerintah dapat mencapai pada pengelolaan yang efektif dan efisien. Sistem pengendalian internal pada

pemerintahan yang baik akan berguna dalam menetapkan lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal.⁸⁸

Sistem pengendalian internal merupakan sebuah proses integral yang dilakukan pada setiap tindakan dan kegiatan secara terus menerus oleh pemimpin dan pegawai dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan kekayaan atau aset negara serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal merupakan salah satu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pencegahan kecurangan atau *fraud*.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Risky Soleman dan dkk (2019) hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.⁸⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila semakin baik sistem pengendalian internal maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat pula. Dengan kata lain sistem pengendalian internal yang baik berarti mampu menekan, mencegah, mengurangi kesalahan pada organisasi pemerintah daerah.

⁸⁸ Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008

⁸⁹Risky Soleman, dkk, *Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kualitas Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Vol. 3 No. 1, (Maluku Utara: 2019), hal. 31-36

B. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian variabel X2 menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kota Blitar. Dari hasil penelitian tersebut, keseluruhan OPD di Kota Blitar memiliki kualitas SDM yang baik. Pegawai di OPD Kota Blitar dinilai memiliki kompetensi dan keterampilan yang baik serta pengalaman yang cukup, hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner yang telah disebarakan dengan skor rata-rata yang berada di kriteria baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai OPD di Kota Blitar sudah memahami dan mampu menyelesaikan tugas masing-masing yang telah diberikan kepadanya.

Penelitian ini sejalan dengan teori dari Benjamin Bukti (2017) menyatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi semata-mata bukan ditentukan oleh sumber daya alam yang sudah tersedia, melainkan banyak ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang ikut berperan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan organisasi. Kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan fungsinya untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara efektif dan efisien.⁹⁰

Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang memiliki keahlian dan kompetensi sebagai roda penggerak organisasi dalam mencapai tujuan. Pengelolaan sumber daya manusia wajib dilakukan sebaik mungkin

⁹⁰ Benjamin Bukti, dkk, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2017), hal 1.

agar mampu memberikan kontribusi yang optimal sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki dalam melaksanakan tanggungjawab dan tugas yang telah diberikan kepadanya yang memiliki dasarpendidikan pengetahuan, pelatihan, dan pengalaman yang mumpuni dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Kualitas sumber daya manusia yang baik sangat dibutuhkan dalam setiap instansi pemerintah agar kontribusi yang diberikan SDM tersebut dapat optimal dalam mencapai tujuan organisasi. Agar dapat memberikan pelayanan yang baik serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah maka sumber daya manusia harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan. SDM yang ada pada organisasi harus mampu bekerja secara maksimal dalam memberikan kontribusi kepada organisasi

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Awwaliyah Nur Azizah (2020) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.⁹¹ Artinya jika kualitas sumber daya manusia meningkat maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat juga. begitupun sebaliknya jika kualitas sumber daya manusia rendah maka semakin rendah pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Karena kualitas sumber daya manusia merupakan seseorang yang memiliki bekal pendidikan pengetahuan, pengalaman dan pelatihan yang cukup untuk melaksanakan tanggungjawab dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan. Kualitas SDM

⁹¹Awwaliyah Nur Azizah, *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vo. 9 No. 2, (Surabaya; Februari 2020), hal. 1-18.

dalam organisasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas kerja pada lingkungan organisasi serta menjadi penentu berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pada organisasi tersebut. Pada sektor publik sumber daya manusia memiliki peran penting dalam menghasilkan kinerja yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan dapat terwujud dengan baik.

C. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian variabel X3 menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kota Blitar. Dari hasil penelitian tersebut, keseluruhan OPD di Kota Blitar belum mendapatkan manfaat dari perkembangan teknologi informasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini ditandai dengan hasil kuesioner yang telah disebar. Sebagian besar responden atau para pegawai OPD di Kota Blitar menjawab “kurang setuju”, serta pada setiap OPD di Kota Blitar belum mengoptimalkan adanya perkembangan teknologi dalam menunjang peningkatan akuntabilitas kinerja. Hal ini dipengaruhi karena kurangnya persiapan dan pembangunan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi yang handal. Dan juga belum dibuatnya pedoman pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mempengaruhi pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada masing-masing

OPD di Kota Blitar. Penelitian ini sesuai dengan teori model TTF Goodhue (1995) bahwa pemanfaatan teknologi dapat tidak dimasukkan sebagai variabel untuk mengukur kinerja. *Utilization* merujuk pada keputusan individu untuk menggunakan atau tidak menggunakan teknologi dalam menyelesaikan serangkaian tugasnya (Sugeng, 1995).⁹²

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Egrinaen Mauliziska (2017) hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.⁹³ Hal ini berarti hubungan pemanfaatan teknologi informasi tidak searah dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi yang dimiliki tidak mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pemanfaatan teknologi informasi menurut Wijana (2007) adalah manfaat yang diharapkan pengguna sistem informasi dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya atau perilaku dalam memakai teknologi pada saat bekerja. Salah satu hal yang diharapkan dari pemanfaatan teknologi informasi adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja. Menurut Setiawan (2005) konsep dari pemanfaatan teknologi diukur berdasarkan ketergantungan pemakai terhadap sistem informasi yang ada guna melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam hal meningkatkan kinerja. Teknologi informasi yang bermanfaat dapat diukur berdasarkan ketergantungan pemakai terhadap sistem

⁹² Sugeng, *Peran Kecocokan Tugas-Teknologi Dalam Memperoleh Pengaruh Positif Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individual*.1995, hal 110.

⁹³Egrinaen Mauliziska, *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, Vol. 2 No. 2, (Oktober, 2017), hal 12-13.

yang ada guna melaksanakan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Teknologi informasi yang digunakan dengan baik akan menghasilkan sebuah pencapaian yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebaliknya jika teknologi informasi tidak digunakan dengan maksimal maka tidak dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Risky Soleman (2019) dengan hasil pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.⁹⁴

D. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga jika sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi sudah diterapkan dengan baik pada setiap OPD di Kota Blitar akan mempengaruhi tingkat peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini mendukung secara konsisten dari hasil penelitian Rio Ramadani (2018), Secara simultan dan bersama-sama kualitas sumber daya

⁹⁴Risky Soleman, dkk, *Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kualitas Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Vol. 3 No. 1, (Maluku Utara: 2019), hal. 31-36.

manusia, sistem pengendalian internal, dan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada ketiga variabel yaitu sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga para instansi pemerintah dapat meningkatkan penilaian pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan setahun sekali. Peningkatan akuntabilitas pada instansi pemerintah dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, namun ketika instansi pemerintah memperbaiki, memperkuat, dan mengoptimalkan sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dengan cara menyiapkan, membangun dan meningkatkan infrastruktur jaringan teknologi yang handal maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.